



## **GUBERNUR JAWA TIMUR**

**NOTA PENJELASAN GUBERNUR  
TERHADAP  
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
(LKPJ) GUBERNUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2015  
KEPADA  
DPRD PROVINSI JAWA TIMUR**

**Surabaya, 28 Maret 2016**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.*

*Yang Saya Hormati,*

Saudara Ketua dan Para Wakil Ketua beserta Segenap Anggota  
DPRD Provinsi Jawa Timur;

Saudara Para Forum Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur;

Saudara Para Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi  
Jawa Timur, serta;

Saudara Hadirin dan Undangan, yang berbahagia.

Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur  
kehadirat Allah SWT – Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah  
melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya kepada kita,

sehingga kita sekalian pada hari ini masih diberi kekuatan, nikmat kesehatan dan dipertemuan kembali di ruang Sidang Paripurna yang mulia ini, dalam rangka penyampaian Nota Penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2015.

*Shalawat* serta *salam*, kita sampaikan kepada Junjungan kita, Nabi Muhammad *Shallallahu'alaihi Wassalam*, beserta keluarga dan para sahabatnya, yang senantiasa menjadi suri tauladan yang sempurna bagi segenap umatnya hingga akhir zaman.

Kebesaran Yang Maha Kuasa dan dukungan seluruh stakeholder merupakan modal kekuatan utama kami selaku Kepala Daerah bersama-sama dengan seluruh jajaran Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur untuk mengemban amanat rakyat dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan pelik dan krusial yang dihadapi oleh masyarakat Jawa Timur serta dalam menggerakkan semangat dan pikiran yang sehat untuk terus menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Jawa Timur untuk tahun-tahun berikutnya.

Kita semua tentunya memahami pesatnya perkembangan dunia saat ini, menjadikan Masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadapi tantangan besar dan kompleksitas

permasalahan global yang semakin berat dari tahun ke tahun. Oleh karenanya, kita patut bersyukur karena selama kurun waktu lima tahun (tahun 2009-2014) telah mampu menjalankan amanat masyarakat Jawa Timur dengan menyelenggarakan urusan wajib dan pilihan melalui kebijakan dan program pembangunan tahap demi tahap dengan hasil capaian yang semakin membaik.

Kedua, saya atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyampaikan ucapan banyak terima kasih serta apresiasi yang tinggi kepada Segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, yang pada hari ini telah hadir pada rapat paripurna pembicaraan tingkat satu tahun 2016 yang secara normatif telah memenuhi aspek legal dengan kehadirannya dalam jumlah yang representatif dan memenuhi jumlah quorum untuk terselenggaranya penyampaian Nota Penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2015.

Semoga rapat paripurna pembicaraan tingkat satu ini dan pertemuan-pertemuan selanjutnya nanti, dalam rangka mencermati LKPJ Akhir Tahun 2015 ini akan dapat berjalan lancar dan mampu memberikan umpan balik (*feed back*) dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan kedepannya.

## **SIDANG DEWAN DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI,**

Perlu kami sampaikan bahwa laporan pertanggungjawaban tahun 2015 ini merupakan laporan tahun pertama kami terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di Jawa Timur untuk masa bakti lima tahun yang kedua yaitu tahun 2014-2019, sedangkan laporan pertanggungjawaban tahun 2014 yang lalu merupakan laporan masa transisi antara berakhirnya masa bakti lima tahun sebelumnya yaitu tahun 2009-2014 dan tahun awal masa bakti tahun 2014-2019 pasca terpilihnya kembali kami sebagai Kepala Daerah bersama Wakil Kepala Daerah untuk periode masa waktu jabatan lima tahun kedua.

Dengan terpilihnya kembali untuk lima tahun kedepan, pada forum yang penting ini ijin saya bersama Wakil Gubernur Jawa Timur menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Jawa Timur yang masih memberikan kepercayaan penuh kepada kami berdua, untuk tetap memimpin Jawa Timur.

Kepercayaan yang besar ini merupakan amanat untuk mewujudkan harapan-harapan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Jawa Timur untuk meningkatkan kesejahteraan yang lebih baik dari sebelumnya, utamanya bagi masyarakat yang masih tergolong rendah tingkat kesejahteraannya.

Kami sangat menyadari untuk mewujudkan harapan-harapan masyarakat Jawa Timur secara keseluruhan tidaklah mudah, apalagi permasalahan-permasalahan berat dan tantangan-tantangan kedepan semakin kompleks yang harus dapat diantisipasi secepatnya dengan bekerja keras dan memaksimalkan sumber daya yang ada dan bekerja sama dengan berbagai pihak.

Dengan berbekal pengalaman selama lima tahun memimpin Jawa Timur, kami tetap optimistis ditengah kondisi perekonomian Nasional dan Global yang belum kondusif. Semoga selama dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan di Jawa Timur lima tahun mendatang akan membawa masyarakat Jawa Timur lebih sejahtera.

### **SIDANG DEWAN DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI,**

Berkaitan dengan pengukuran kinerja terhadap laporan pertanggungjawaban tahun 2015, perlu kami sampaikan kepada Segenap Anggota Dewan Yang Terhormat bahwa selama lima tahun masa kerja tahun 2009-2014, kinerja kami diukur dengan menggunakan parameter 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) Jawa Timur yaitu Prosentase Jumlah Penduduk Miskin terhadap Total Jumlah Penduduk Miskin Jawa Timur, Prosentase Tingkat Pengangguran Terbuka, Prosentase Pertumbuhan Ekonomi Jawa

Timur, Indeks Disparitas Wilayah dan Indeks Pembangunan Manusia.

Sedangkan, pada penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah 5 (lima) tahun kedepan yaitu tahun 2014-2019 ada perubahan pengukuran indikator kinerja dengan menggunakan parameter sebanyak 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama Jawa Timur yaitu Prosentase Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Gini, Pemerataan Pendapatan versi Bank Dunia, Prosentase Tingkat Kemiskinan, Prosentase Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Gender dan Kualitas Air Sungai. Perubahan ini tentunya melalui berbagai pertimbangan dengan melihat perkembangan dinamika dan permasalahan krusial di Jawa Timur dan telah disepakati oleh Seluruh Anggota Dewan Yang Terhormat sebagaimana nampak pada Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.

Penambahan Indikator Kinerja Utama dari lima menjadi delapan ini bukan hanya sekedar menambah untuk meningkatkan kuantitas variabelnya saja, tetapi melalui pemikiran yang komprehensif dengan mempertimbangkan kondisi, kebutuhan dan

kompleksitas permasalahan Jawa Timur maupun ruang lingkup visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun kedepan secara holistik, serta mempertimbangkan keseimbangan kondisi lingkungan Jawa Timur dengan pesatnya pembangunan daerah baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun semua pihak yang berkepentingan.

Perubahan pengukuran kinerja menjadi delapan Indikator Kinerja Utama oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur memberikan makna bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah tanggap dan merespon dengan cepat dinamika perubahan politik, ekonomi, sosial dan budaya serta keamanan dan ketertiban yang terjadi.

Bagi Pemerintah Daerah Provinsi, cakupan 8 (delapan) IKU ini dimaksudkan untuk mengukur kekuatan, kemampuan dan konsentrasi seorang Kepala Daerah beserta jajaran di bawahnya dalam rangka memenuhi kewajiban terhadap visi dan misi yang ditetapkan 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu, diharapkan mampu memberikan dukungan terhadap program strategis Nasional yaitu Nawacita dalam rangka untuk mendorong kinerja Pemerintah, sedangkan bagi Seluruh Anggota Dewan Yang Terhormat selaku mitra kerja Gubernur, 8 (delapan) IKU ini menjadi fokus untuk

mencermati sejauh mana kebijakan-kebijakan prioritas pembangunan kami benar-benar mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mendasar di Jawa Timur.

### **SIDANG DEWAN DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI,**

Sebelum saya sampaikan substansi tentang Nota Penjelasan LKPJ Tahun 2015 ini, terlebih dahulu izinkan saya menyampaikan beberapa hal penting terkait kondisi umum yang terjadi di Jawa Timur pada tahun 2015, sebagai berikut:

*Pertama*, mengenai bencana alam yang terjadi di Jawa Timur. Selama kurun waktu tahun 2015 telah terjadi peristiwa bencana alam di Jawa Timur antara lain gempa bumi, gempa tektonik/erupsi gunung berapi, bencana banjir dan tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan.

Peristiwa bencana alam yang terjadi di beberapa daerah di Jawa Timur telah menyebabkan kerusakan asset Pemerintah Daerah dan kekayaan milik warga masyarakat antara lain gedung sekolah, perkantoran, lampu penerangan jalan, sawah dan kandang peternak, rumah penduduk dan lain-lain. Terhadap kejadian yang menimpa warga masyarakat kami turut prihatin mudah-mudahan kerugian yang dialami tidak sampai mengganggu



aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Patut kita apresiasi sikap tanggap darurat para petugas dan masyarakat sehingga kejadian ini tidak sampai menimbulkan kerugian yang terlalu besar, dengan demikian dapat segera dilakukan perbaikan dan difungsikan kembali untuk pelayanan kepada masyarakat.

Kejadian kebakaran hutan di Jawa Timur yang melanda kawasan hutan Gunung Semeru yang memiliki luas 20 hektar lebih masih cukup terkendali, hal ini berkat kesigapan seluruh jajaran Pemerintahan Daerah baik para petugas dari Perhutani, Aparat terkait di daerah maupun para sukarelawan kebakaran hutan dapat mengatasi dengan cepat sehingga apinya tidak sampai meluas ke seluruh kawasan hutan. Kejadian ini secara keseluruhan tidak sampai menimbulkan keresahan berkepanjangan di masyarakat yang terkena bencana maupun yang dirugikan, sehingga peristiwa dari awal tahun hingga akhir tahun 2015 kondisi Jawa Timur masih dapat diatasi dan dapat diselesaikan dengan segera.

*Kedua*, mengenai kondisi politik terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serentak yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 di 19 (sembilan belas) Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur, secara keseluruhan telah berjalan

dengan lancar meskipun pasca PILKADA masih ada tuntutan dari salah satu calon pasangan Kepala Daerah di 6 (enam) Kabupaten yang melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi karena menganggap adanya dugaan pelanggaran/kecurangan yang dilakukan oleh calon pasangan pemenang dalam proses perhitungan, sehingga meminta dilaksanakannya PILKADA ulang. Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Malang, Jember, Situbondo, Ponorogo, Gresik dan Sumenep.

Berkaitan dengan selesainya pelaksanaan PILKADA serentak, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan tanggal 17 Pebruari 2016 beberapa waktu yang lalu sebagai hari resmi pelantikan Kepala Daerah terpilih. Syukur alhamdulillah moment pelaksanaan PILKADA di Jawa Timur telah berjalan dengan baik dan lancar karena proses di Mahkamah Konstitusi telah selesai.

*Ketiga*, mengenai kondisi perekonomian Jawa Timur tahun 2015 yang mengalami perlambatan pertumbuhan disebabkan perekonomian global yang belum pulih, sehingga target tahun 2015 sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2014-2019 belum sesuai harapan seperti tahun-tahun sebelumnya.

Meskipun pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2015 sebesar 5,44 persen lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, namun masih lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan nasional yang hanya mencapai 4,79 persen. Perlambatan ini lebih dikarenakan faktor eksternal seperti menguatnya dolar, ketidakstabilan harga minyak mentah dunia, krisis ekonomi Yunani dan naiknya harga pangan dunia.

### **SIDANG DEWAN DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI,**

Selanjutnya, perlu kami sampaikan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2015 ini disusun dalam rangka memenuhi kewajiban Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 69 Ayat 1, serta Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat khususnya Pasal 17 Ayat 1.

Secara operasional penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban tahun 2015 berpedoman pada Peraturan

Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 pasal 15 - 23, khususnya pasal 16, yang menyatakan bahwa LKPJ Gubernur disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), di Jawa Timur ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015, serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015.

Pelaksanaan RKPD Tahun 2015 dimaksud merupakan penjabaran **tahun pertama** dari Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019. Implementasi RKPD tahun 2015 dilaksanakan melalui program dan kegiatan dengan menggunakan instrumen kebijakan publik berupa APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 maupun kerangka regulasi. Instrumen anggaran APBD 2015 dimaksud secara filosofis dilaksanakan melalui dua tahap, *pertama*, kesepakatan bersama antara Gubernur dengan DPRD tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) baik pada APBD murni dan perubahan, *kedua*, melalui penetapan Peraturan Daerah tentang

APBD Tahun Anggaran 2015 yang secara filosofis merupakan produk bersama setelah melalui proses yang melibatkan kedua belah pihak baik pada APBD murni maupun perubahan. Secara eksplisit normatif, maka acuan konteks kesepakatan bersama dimaksud sebagaimana Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan DPRD Provinsi, Tanggal 29 Agustus 2014 Nomor 188/6/NK/013/2014 dan Nomor : 160/06/NK/060/2014 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015, serta Tanggal 29 Agustus 2014 Nomor 188/7/NK/013/2014 dan Nomor 160/07/NK/060/2014 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015.

Selanjutnya pada tahap perubahan APBD 2015, didahului dengan Nota Kesepakatan Bersama tanggal 4 Juli 2015 Nomor 188/03/NK/013/2015 dan 160/03/NK/060/2015 tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015, serta Nomor 188/04/NK/013/2015 dan 160/04/NK/060/2015 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015.

Atas dasar kesepakatan bersama, pada APBD murni tentang KUA dan PPAS APBD Tahun 2015 dimaksud, secara normatif merupakan pedoman bagi penetapan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015.

Kemudian pada perubahan APBD Tahun 2015, secara normatif ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 serta Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015.

Filosofi anggaran pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 dimaksud agar dipahami dalam konteks stimulasi, maupun fasilitasi untuk memobilisasi sumberdaya lain baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat dalam rangka mewujudkan kinerja agregat sebagaimana telah ditetapkan pada RPJMD 2014-2019.

Secara kuantitatif, maka dalam rangka implementasi program dan kegiatan tahun 2015 didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni dan Perubahan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 dengan kekuatan seluruhnya sebesar 22,246 triliun rupiah lebih, dalam pelaksanaannya terealisasi sebesar 22,218 triliun rupiah lebih atau tercapai 99,88 persen, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari target sebesar 14,900 triliun rupiah lebih, terealisasi sebesar 15,392 triliun rupiah lebih atau tercapai 103,31 persen, melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 492 milyar rupiah lebih. Realisasi tersebut diperoleh dari penerimaan pajak daerah sebesar 101,36 persen, penerimaan retribusi daerah sebesar 115,99 persen, penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 100,19 persen dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 114,50 persen.
- b. Dana Perimbangan, tahun 2015 ditargetkan sebesar 3,598 triliun rupiah lebih, terealisasi sebesar 3,115 triliun rupiah lebih atau mencapai 86,59 persen, kurang dari target yang telah ditetapkan sebesar 482 milyar rupiah lebih. Realisasi penerimaan dana perimbangan tersebut dari dana bagi hasil pajak/bukan pajak sebesar 75,18 persen, dana alokasi umum

sebesar 100 persen dan dana alokasi khusus sebesar 100 persen.

- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, tahun 2015 ditargetkan sebesar 3,747 triliun rupiah lebih, terealisasi sebesar 3,710 triliun rupiah lebih atau mencapai 99,00 persen, kurang dari target yang telah ditetapkan sebesar 37 milyar rupiah lebih. Realisasi penerimaan ini diperoleh dari penerimaan pendapatan hibah sebesar 87,43 persen serta dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar 99,14 persen.

#### **SIDANG DEWAN DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI,**

Berdasarkan atas anggaran tersebut, dialokasikan untuk Belanja Daerah sebesar 24,361 triliun rupiah lebih, dalam pelaksanaannya sebesar 22,936 triliun rupiah lebih atau mencapai 94,15 persen, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Tidak Langsung dialokasikan sebesar 15,791 triliun rupiah lebih, terealisasi sebesar 15,064 triliun rupiah lebih atau mencapai 95,40 persen, dengan rincian : Belanja Pegawai terealisasi sebesar 92,70 persen; Belanja Bunga terealisasi sebesar 97,25 persen; Belanja Hibah terealisasi sebesar 96,79 persen; Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar 96,68 persen; Belanja bagi Hasil kepada



Pemerintah/Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa terealisasi sebesar 93,45 persen; Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa terealisasi sebesar 99,35 persen dan Belanja Tidak Terduga terealisasi sebesar 24,57 persen.

- b. Belanja Langsung dialokasikan sebesar 8,570 triliun rupiah lebih, terealisasinya sebesar 7,871 triliun rupiah lebih atau mencapai 91,85 persen, dengan rincian : Belanja Pegawai terealisasi sebesar 662,264 milyar rupiah lebih, Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar 4,950 triliun rupiah lebih dan Belanja Modal terealisasi sebesar 2,258 triliun rupiah lebih.

Berikutnya, dari sisi Pembiayaan Daerah Tahun 2015, dialokasikan sebesar 2,114 triliun rupiah lebih, dalam pelaksanaannya terealisasinya sebesar 2,214 triliun rupiah lebih, atau mencapai 104,73 persen terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun sebelumnya dengan alokasi anggaran sebesar 2,4502 triliun rupiah lebih, realisasinya sebesar 2,4501 triliun rupiah lebih atau mencapai 99,99 persen.

- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah dialokasikan sebesar 335,333 milyar rupiah lebih, realisasinya sebesar 235,333 milyar rupiah lebih atau mencapai 70,18 persen.

## **SIDANG DEWAN DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI,**

Berkaitan dengan Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2015, perlu kami informasikan bahwa secara keseluruhan Laporan keterangan pertanggungjawaban tahun 2015 disusun dalam bentuk 3 (tiga) buku meliputi :

Buku I, merupakan Nota Penjelasan Gubernur yang menjelaskan secara ringkas atau garis besar penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, meliputi 2 (dua) bagian yaitu *Kesatu*, mengenai Realisasi Perkembangan Capaian Kinerja 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2015 dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019. *Kedua*, mengenai penghargaan Pemerintah atas prestasi yang dicapai Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015.

Buku II merupakan buku substansi "Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015", yang menjelaskan arah kebijakan umum pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan secara makro, penyelenggaraan

urusan desentralisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Buku III merupakan buku lampiran yang menjelaskan realisasi capaian kinerja urusan wajib dan pilihan per triwulan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jawa Timur.

Ketiga buku laporan pertanggungjawaban ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sebagai wujud implementasi dan realisasi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di Jawa Timur pada Tahun 2015.

Selanjutnya, untuk memenuhi ketentuan tata tertib persidangan DPRD sebelum agenda sidang paripurna ini berlangsung, telah disampaikan ketiga buku laporan pertanggungjawaban secara lengkap kepada Semua Anggota Dewan Yang Terhormat, melalui Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 005/2730/202.5/2016 Tanggal 23 Maret 2016 perihal : Penyampaian Buku dan CD LKPJ Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015.

Selanjutnya, laporan selengkapnya saya bacakan sebagai berikut :

## **BAGIAN PERTAMA.**

### **Realisasi Perkembangan Capaian Kinerja 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama.**

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka mewujudkan visi, misi, sebagaimana substansi RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, telah menetapkan target pencapaian keberhasilan kinerja dengan alat ukur 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan masing-masing indikator Kinerja Utama tersebut diuraikan sebagai berikut :

#### **1. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi**

Pembangunan di segala bidang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Jawa Timur bersama masyarakat, utamanya bidang ekonomi semakin meningkat seiring dengan dinamika pembangunan itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya besaran angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Apabila dihitung atas dasar harga berlaku, total nilai PDRB Jatim tahun 2013 sebesar 1.382,43 triliun rupiah; 1.540,70 triliun rupiah pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 menjadi 1.689,88 triliun rupiah. Sedangkan jika dihitung menggunakan atas dasar harga konstan tahun 2010, total nilai PDRB Jatim tahun 2013 sebesar 1.192,84 triliun rupiah,

kemudian meningkat menjadi 1.262,70 triliun rupiah pada tahun 2014 dan 1.331,42 triliun rupiah pada tahun 2015.

Dari angka tersebut, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dihitung berdasar perubahan PDRB atas dasar harga konstan. Ini menunjukkan karena pertumbuhan ekonomi ini benar-benar diakibatkan oleh perubahan jumlah barang dan jasa sehingga sudah bebas dari pengaruh harga (pertumbuhan riil). Dari metodologi itu, pada tahun 2013 perekonomian Jawa Timur tercatat tumbuh 6,08 persen, berikutnya tahun 2014 menjadi 5,86 persen, dan pada tahun 2015 menjadi 5,44 persen.

Ekonomi Jawa Timur Tahun 2015 bila dibandingkan Tahun 2014 tumbuh sebesar 5,44 persen, sedikit melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,86 persen. Seperti yang telah saya sampaikan bahwa perlambatan ini lebih dikarenakan faktor eksternal seperti menguatnya dolar, ketidak stabilan harga minyak mentah dunia, krisis ekonomi Yunani dan naiknya harga pangan dunia. Meskipun demikian capaian pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2015 termasuk cukup tinggi dibandingkan provinsi-provinsi lain di Jawa, kecuali DKI Jakarta, dan melampaui pertumbuhan Nasional yang hanya mencapai 4,79 persen.

## **SIDANG DEWAN DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI,**

Dapat kami sampaikan bahwa, **Kinerja sektor industri** pengolahan berdasarkan data tahun dasar 2010, secara kumulatif nilai PDRB atas dasar harga berlaku sektor industri pengolahan Jawa Timur pada tahun 2015 mencapai 494,69 trilyun rupiah memberikan kontribusi sebesar 20,57 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku sektor industri pengolahan nasional yang mencapai nilai sebesar 2.405,4 trilyun rupiah pada tahun 2015, Industri pengolahan Jawa Timur Tahun 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 5,30 persen bila dibandingkan Tahun 2014. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan Industri Nasional trend pertumbuhan sektor industri pengolahan Jawa Timur Tahun 2015 berada diatas pertumbuhan industri nasional, pertumbuhan sektor industri pengolahan Jawa Timur pada tahun 2015 mencapai 5,30 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan sektor industri pengolahan nasional, yaitu sebesar 4,25 persen.

Kinerja Sektor Industri Pengolahan pada tahun 2015 mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu sebesar 49,39 trilyun rupiah atau meningkat 11,09 persen jika

dibandingkan pada tahun 2014 yang mencapai nilai 445,30 triliun rupiah.

**Pada kinerja Investasi**, ditandai dengan Total Realisasi Investasi Jawa Timur Tahun 2015 sebesar 67,91 triliun rupiah terdiri dari PMA sebesar 32,42 triliun rupiah dan PMDN sebesar 35,49 triliun rupiah atau meningkat 9,82 persen dibandingkan tahun 2014 sebesar 61,84 triliun rupiah terdiri dari PMA sebesar 19,29 triliun rupiah dan PMDN sebesar 42,55 triliun rupiah.

Sedangkan Capaian minat Penanaman Modal di Jawa Timur berdasarkan Izin Prinsip pada Tahun 2015 mencapai sebesar 172,57 triliun rupiah, terdiri dari PMA sebesar 130,26 triliun rupiah dan PMDN sebesar 42,31 triliun rupiah melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 104,86 triliun rupiah, PMA sebesar 57,83 triliun rupiah dan PMDN 47,03 triliun rupiah. Peningkatan tersebut mengindikasikan keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Promosi yang dilakukan Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur dan tersedianya informasi Potensi dan Peluang Investasi serta Pelayanan Perizinan yang mudah, cepat, transparansi dan tidak dipungut biaya serta Iklim Investasi yang Kondusif di Jawa Timur,

sedangkan capaian kinerja minat penanaman modal berdasarkan Izin Prinsip khususnya PMDN tidak dapat mencapai target dikarenakan nilai tukar rupiah yang tidak stabil dan masih perlu adanya penetapan petunjuk teknis dari kebijakan ekonomi bagi daerah.

**Dari Kinerja Perdagangan,** Pertumbuhan lapangan usaha perdagangan di Jawa Timur selama kurun waktu lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Hal ini dapat dilihat pada pertumbuhan lapangan usaha perdagangan di Jawa Timur pada tahun 2014 sebesar 4,61 persen dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 6,00 persen, jauh melampaui pertumbuhan lapangan usaha perdagangan nasional yang mencapai 2,47 persen. Trend pertumbuhan lapangan usaha perdagangan Jawa Timur hampir selalui melampaui trend pertumbuhan lapangan usaha perdagangan Nasional.

Prosentase Kontribusi lapangan usaha Perdagangan terhadap PDRB ADHB Jawa Timur di pada tahun 2013-2015 berkisar pada angka 17-18 persen. Lapangan usaha Perdagangan merupakan salah satu dari aspek di PDRB Jatim yang berkontribusi besar bagi perekonomian Jawa Timur.



Berdasarkan Data BPS, perekonomian Jawa Timur tahun 2015 dari sisi pengeluaran mengalami pertumbuhan sebesar 5,44 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen net ekspor antar daerah yaitu sebesar 13,36 persen dengan net ekspor perdagangan dalam negeri Jawa Timur surplus sebesar 99,83 trilyun rupiah.

Pada tahun 2013 nilai net ekspor perdagangan dalam negeri sebesar 71,85 trilyun rupiah mengalami kenaikan sebesar 15,98% dibandingkan dengan nilai tahun 2012 sebesar 61,95 trilyun rupiah. Nilai net ekspor perdagangan dalam negeri tahun 2015 sebesar 99,83 trilyun rupiah sedikit menurun jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 100,173 trilyun rupiah. Penurunan pertumbuhan nilai ekspor dalam negeri di Jawa Timur disebabkan oleh krisis global dan naiknya harga BBM serta kebutuhan pokok lainnya. Bila dikaitkan dengan kinerja ekspor yang cenderung stagnan karena melemahnya pasar tujuan ekspor akibat situasi lesunya perekonomian negara-negara Eropa dan Amerika serta nilai tukar rupiah melemah terhadap dollar, maka upaya mendorong kinerja perdagangan dalam negeri (ekspor domestik) menjadi salah satu fokus utama pembangunan perekonomian Jawa Timur.

## **SIDANG DEWAN DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI,**

Perlu kami sampaikan secara singkat bahwa beberapa fokus pada tiga sektor dominan maupun sektor pendukung yang mampu menstimulasi kinerja ekonomi Jawa Timur tahun 2015 sebagai berikut:

*Pertama*, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, yang pada tahun 2015 tumbuh 6,00 persen dan memberikan kontribusi sebesar 17,64 persen, distimulasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui berbagai prioritas program dan kegiatan yang difokuskan antara lain dengan optimalisasi pemasaran produk di pasar domestik melalui pendirian dan penguatan peran Kantor Perwakilan Dagang (KPD) di 26 Provinsi, Promosi /Pameran Dagang baik di dalam dan luar negeri khususnya di negara-negara non konvensional, fasilitasi berbagai forum bisnis baik di dalam maupun luar negeri.

*Kedua*, Sektor Industri Pengolahan, yang pada tahun 2015 tumbuh 5,30 persen dan memberikan kontribusi 29,27 persen, distimulasi melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang difokuskan pada pengembangan Industri Kecil Menengah baik Agro maupun Non Agro serta fasilitasi dalam hal standar mutu, Perkuatan kelembagaan Industri Kecil Menengah (IKM) melalui

klitik bisnis, fasilitasi kerangka regulasi maupun penyelenggaraan forum-forum bisnis untuk akselerasi kinerja sektor industri pengolahan.

**Ketiga,** Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tahun 2015, tumbuh 3,46 persen dan memberikan kontribusi 13,75 persen terhadap struktur ekonomi Jawa Timur, beberapa program dan kegiatan sebagai stimulasi dalam mewujudkan kinerja sektor pertanian difokuskan pada peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian termasuk penanganan paska panen dengan fokus antara lain pengembangan perbenihan, rekayasa kelembagaan melalui *Cooperatif Farming (CF)*, *Good Agriculture Practices (GAP)*, fasilitasi sarana dan prasarana usaha produksi maupun paska panen, peningkatan populasi sapi potong maupun sapi perah, inseminasi buatan/sapi berlian dan fasilitasi sarana prasarana alat pengolah pakan ternak (*Mini Feedmill*), peningkatan produksi gula melalui pengembangan tebu lahan kering, dan peningkatan kualitas tembakau, peningkatan produksi kakao dan tanaman kopi arabika, peningkatan produksi perikanan budidaya dan tangkap serta fasilitasi sarana prasarana Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), serta peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan.

Selain itu, dari aspek pembiayaan Bank Indonesia diharapkan dapat meningkatkan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Bank Pelaksana, dan Pemerintah Provinsi juga memberikan dorongan pembiayaan di sektor mikro, kecil maupun menengah melalui berbagai program maupun skema kebijakan terhadap pembiayaan sektor ekonomi. Di sektor pembiayaan mikro, pada tahun 2015 dilakukan penambahan modal lanjutan bagi koperasi wanita yang berkinerja baik. Disamping itu, program fasilitasi pembiayaan mikro lainnya adalah pemberian bantuan permodalan bagi Koperasi Pondok Pesantren yang tersebar di wilayah Jawa Timur, dan penguatan permodalan bagi Lembaga Masyarakat Desa Hutan serta Koperasi Karyawan. Sedangkan pada skala kecil dan menengah, kebijakan pembiayaan yang diterapkan masih dalam konteks skema dana bergulir, dan Penjaminan Kredit melalui PT. Jamkrida.

Selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa, dari sisi produksi, semua kategori mengalami pertumbuhan positif, kecuali Pengadaan Listrik dan Gas yang mengalami kontraksi sebesar 3,00 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Pertambangan dan Penggalian sebesar 7,92 persen; diikuti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,91 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Net

Ekspor Antar Daerah sebesar 13,39 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi berikutnya adalah komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 5,73 persen. Kemudian komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pengeluaran konsumsi pemerintah yang masing-masing tumbuh sebesar 3,36 persen dan 2,20 persen. Sementara komponen lainnya mengalami kontraksi.

***Keempat***, Aspek Infrastruktur. Pada kesempatan hari ini kami melaporkan secara umum pembangunan infrastruktur jalan, pembangunan Jaringan Infrastruktur Irigasi dan Pengairan serta Pembangunan Infrastruktur Transportasi Perhubungan Darat dan Laut.

Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, dilaksanakan melalui Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dengan sasaran meningkatnya jalan provinsi yang dapat dilalui kendaraan dengan cepat, aman, dan nyaman. Pada tahun 2015, panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap (baik) mencapai 1.574,82 Kilometer, meningkat 2 persen jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 1.543,93 Kilometer.

Panjang Jalan Lintas Selatan (JLS) yang direncanakan 673,872 Kilometer, saat ini sudah terbangun jalan baru sepanjang 109,565 Kilometer, jalan lama eksisting sepanjang 253,455 Kilometer dengan total panjang yang sudah terbangun 363,020 Kilometer. Sedangkan yang belum terbangun 310,852 Kilometer. Status pembebasan tanah sampai dengan tahun 2015 yaitu sudah terealisasi seluas 418,82 Kilometer, sedangkan yang belum dibebaskan seluas 255,049 Kilometer. Sedangkan untuk panjang jembatan JLS yang terbangun pada tahun 2014 mencapai 4.113 meter dan meningkat pada tahun 2015 menjadi 4.373 meter.

Selanjutnya, Pembangunan Infrastruktur Jaringan Irigasi dan Pengairan, dengan sasaran Meningkatnya pengelolaan sumber daya air untuk memenuhi pelayanan kebutuhan air baku melalui konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air didukung oleh 3 (tiga) program yaitu Program konservasi sumber daya air dengan target volume resapan air sebesar 12.800.000 meter kubik dan terealisasi sebesar 11.781.429 meter kubik; Program pendayagunaan sumber daya air dengan target ketersediaan air baku sebesar 19.343.000.000 meter kubik dan terealisasi sebesar 19.413.567.429 meter kubik; Program pengendalian

daya rusak air dengan target luas genangan pada daerah rawan banjir sebesar 900 hektar dan terealisasi sebesar 951,98 hektar.

Adapun, Pembangunan Infrastruktur Perhubungan dan Transportasi Darat dilaksanakan melalui Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dengan kinerja prosentase pertumbuhan penumpang pada lintas penyeberangan Jawa Timur dari jumlah penumpang pada lintas penyeberangan Jawa Timur pada tahun 2014 sebanyak 13.559.194 orang pada tahun 2015 turun sebanyak 12.661.611 orang; Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Laut dengan target kinerja prosentase pertumbuhan bongkar muat barang pada pelabuhan utama Jawa Timur pada tahun 2014 sebanyak 15.828.774 ton pada tahun 2015 turun sebanyak 15.285.670 ton; Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Udara dengan target kinerja Prosentase pertumbuhan penumpang di Bandara Abdurrahman Saleh Malang pada tahun 2014 sebanyak 626.638 orang pada tahun 2015 naik sebanyak 676.574 orang atau 7,97 persen.

***Kelima***, Aspek Sumber Daya Manusia. Pembangunan manusia berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara dua arah (*reversible*), khususnya kualitas SDM yang diindikasikan dengan

peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan produktif. Untuk penjelasan hal ini akan saya sampaikan pada sub bahasan indikator IKU pencapaian IPM.

## **SIDANG DEWAN DAN HADIRIN YANG TERHORMAT,**

*Indikator Kinerja Utama berikutnya adalah :*

### **2. Indeks Gini**

Indeks Gini Rasio digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan masyarakat. Koefisien gini merupakan suatu ukuran pemerataan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Bila mengacu pada nilai gini rasio, tingkat ketimpangan rata-rata konsumsi per kapita di Jawa Timur 2013-2015 masih masuk dalam kategori sedang (antara 0,3 – 0,5). Pada tahun 2014 sebesar 0,37 di tahun 2015 (angka sementara) meningkat menjadi 0,41. Hal ini dikarenakan laju kenaikan pengeluaran 20 persen teratas (penduduk berpendapatan tinggi) lebih cepat dibanding kenaikan pengeluaran penduduk kelompok 40 persen terendah (penduduk berpendapatan rendah). Namun demikian meskipun terjadi peningkatan ketimpangan, tetapi masih dalam koridor ketimpangan sedang.



Program yang diarahkan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat di Jawa Timur diantaranya adalah Program Pemberdayaan Skala Mikro yang ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan omset usaha mikro; Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang ditujukan untuk meningkatkan perputaran modal koperasi wanita; Program Peningkatan Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang ditujukan untuk meningkatkan nilai produksi industri agro.

### **3. Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia**

Bank Dunia mengukur pendistribusian kue ekonomi atau mengukur pemerataan pendapatan dalam masyarakat dengan pendekatan besar persentase distribusi pengeluaran penduduk suatu wilayah berdasarkan kategori pendapatan 40 persen terbawah, 40 persen menengah dan 20 persen teratas.

Kategori ketimpangan menurut Bank Dunia diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40 persen terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk. Pengelompokkannya adalah sebagai berikut :

- a. jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi.
- b. jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang/menengah.
- c. jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah.

Berdasarkan skala kesenjangan yang telah ditetapkan, pada tahun 2015 penduduk yang berpendapatan 40 persen terbawah menikmati hasil kegiatan ekonomi sebesar 18,77 persen. Jika menggunakan indikator ini, maka ketimpangan pendapatan yang terjadi di Jawa Timur termasuk kategori rendah.

#### **4. Tingkat Kemiskinan**

Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengatasi persoalan kemiskinan di Jawa Timur tahun 2015, dilakukan

secara simultan, terpadu dan terintegrasi yang melibatkan beberapa jajaran Pemerintahan Daerah terkait serta instansi lintas sektor yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan permasalahan kemiskinan.

Dari kinerja beberapa instansi tersebut, kami akan melaporkan upaya mengatasi permasalahan kemiskinan melalui program pembangunan yang diarahkan pada Pemberdayaan Masyarakat di Perkotaan dan Perdesaan.

Pada tahun 2015 Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan arah kebijakan dengan 4 (empat) sasaran yaitu:

- 1) Kelompok usaha ekonomi Masyarakat, lembaga ekonomi masyarakat di desa/kelurahan dan pemberdayaan masyarakat miskin;
- 2) Meningkatnya pusat layanan informasi Teknologi Tepat Guna (TTG) dan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pengelolaan SDA dan sarana prasarana dasar;
- 3) Meningkatnya kapasitas SDM dan Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
- 4) Terwujudnya peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat.

Keempat sasaran ini dicapai dengan melaksanakan 4 (empat) prioritas program Pemberdayaan Masyarakat yaitu

melalui Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat, Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam, Program Peningkatan Kapasitas SDM dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/kelurahan serta Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.

Angka kemiskinan di Jawa Timur selama tiga tahun terakhir secara gradual (2013-2015) menunjukkan trend penurunan. Pada tahun 2013 angka kemiskinan sebesar 12,73 persen atau dengan jumlah penduduk miskin sebesar 4.893,01 ribu jiwa, selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 12,28 persen atau jumlah penduduk miskin sebesar 4.748,42 ribu jiwa dan tahun 2015 angkanya tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar 12,28 persen atau jumlah penduduk miskin sebesar 4.775,97 ribu jiwa.

Turunnya persentase penduduk miskin selama periode tahun 2013-2015, sebagai wujud upaya keras Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Berbagai upaya dan strategi yang dilakukan memberikan kontribusi penurunan kemiskinan dengan tetap meningkatkan ketajaman sasaran program pengentasan kemiskinan.

## 5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Dalam rangka mengatasi persoalan pengangguran di Jawa Timur tahun 2015, Pemerintah Provinsi menetapkan kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh beberapa instansi terkait dan lintas sektor dengan mengimplementasikan berbagai program-program prioritas yang saling sinergi, terpadu, terintegrasi serta simultan.

Salah satu kebijakan program instansi terkait tersebut ditetapkan melalui arah kebijakan dengan 4 (empat) sasaran yaitu:

1. Meningkatnya keterampilan/ kompetensi tenaga kerja dan produktivitas kerja;
2. Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di sektor informal;
3. Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif dan kesejahteraan pekerja;
4. Meningkatnya pengawasan ketenaga-kerjaan, K3 serta perlindungan pekerja/buruh.

Keempat sasaran ini dicapai dengan mengimplementasikan 4 (empat) prioritas program pembangunan, yaitu melalui Program Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja, Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja, Program Pengawasan Ketenagakerjaan dan Perlindungan Tenaga Kerja serta Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja.

Dengan dukungan program prioritas di bidang ketenagakerjaan, pada tahun 2015 diperoleh hasil yang lebih baik. Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2015 yang dilakukan oleh BPS Provinsi Jawa Timur, jumlah Angkatan Kerja di Jawa Timur mencapai sebanyak 20,274 juta orang atau bertambah sebesar 124,69 ribu orang dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja tahun 2014 sebesar 20,149 juta orang. Dari angkatan kerja, yang terserap dalam lapangan kerja sekitar 95,53 persen atau 19,37 juta.

Sementara pencari kerja yang tidak/belum terserap di pasar kerja (TPT) sebesar 4,47 persen atau 906,90 ribu orang pada tahun 2015, meningkat sedikit dibandingkan kondisi tahun 2014 yang mencapai 4,19 persen atau 843,49 ribu orang. Dalam ekonomi praktis, daerah yang mempunyai potensi ekonomi sangat baik akan menjadi tujuan utama bagi pencari kerja. Membanjirnya pencari kerja di daerah yang mempunyai potensi ekonomi, jika tidak terserap dengan cepat, maka akan

menjadi beban daerah tujuan dan secara statistik akan tercatat sebagai penganggur (pencari kerja).

## **SIDANG DEWAN DAN HADIRIN YANG TERHORMAT,**

*Indikator Kinerja Utama berikutnya adalah :*

### **6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Pada hakekatnya pembangunan ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat. Pembangunan yang hakiki tidak hanya dinikmati oleh segelintir kelompok tetapi secara holistik dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan yang dimaksud tidak hanya terfokus pada pembangunan gedung sarana dan prasarana, tetapi berimplikasi pada perubahan kualitas manusia. Bisa dianalogkan, pembangunan yang pro kepada kualitas manusia itu bercirikan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam mewujudkan pembangunan yang hakiki, baik Pemerintah Pusat maupun Daerah telah melakukan berbagai kebijakan dan program untuk meningkatkan kualitas manusia. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga melakukan upaya serius dengan program peningkatan kualitas manusia baik dari kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan ekonomi. Masyarakat akan merasa sejahtera, jika pembangunan yang terjadi memberikan implikasi

pada tercapainya umur panjang dan sehat, masyarakat semakin berpengetahuan dan dapat hidup layak secara ekonomi. Potret implikasi pembangunan terhadap kualitas manusia dapat dilihat dari hasil capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Penghitungan IPM untuk seluruh negara menggunakan metode baru. Hal ini dikarenakan IPM metode lama mempunyai kelemahan dan perlu diperbaharui. Pada metode baru ini, angka melek huruf sudah tidak dipakai lagi digantikan angka harapan sekolah dan penghitungan kompositnya menggunakan geometric mean. Dampak dari perubahan penghitungan ini, menyebabkan terjadi perubahan angka IPM lebih rendah dibanding metode lama. Tetapi perlu diingat bahwa hasil penghitungan metode baru tidak bisa dibandingkan lagi dengan metode lama, karena sudah berbeda metodologi.

Selama tiga tahun terakhir, pembangunan manusia di Jawa Timur yang ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan tren yang menggembirakan. Kondisi itu ditunjukkan oleh angka IPM pada tahun 2013 sebesar 67,55 meningkat terus tiap tahun, hingga mencapai 68,14 pada tahun 2014. Pada tahun 2015, angka IPM Jawa Timur meningkat kembali menjadi 68,66 (angka sangat sementara). Meningkatnya angka IPM ini mengindikasikan



pembangunan sosial ekonomi di Jawa Timur berimplikasi pada peningkatan kualitas pembangunan masyarakatnya.

Selanjutnya, mengenai kinerja program Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang memberikan kontribusi terhadap ketiga variabel tersebut masing-masing saya sampaikan sebagai berikut.

*Pertama*, Bidang Pendidikan, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan arah kebijakan bidang pendidikan dengan sasaran Meningkatnya akses dan pemerataan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Meningkatnya akses dan pemerataan layanan Pendidikan Dasar yang berkualitas, Meningkatnya akses dan pemerataan layanan Pendidikan Menengah yang berkualitas, Meningkatnya akses memperoleh layanan Pendidikan Tinggi, Meningkatnya kuantitas dan kualitas Pendidikan Nonformal, Meningkatnya jumlah pendidik yang memiliki kualifikasi minimal D4/S1 serta Tersedianya layanan pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di seluruh kabupaten/kota.

Untuk mencapai sasaran tersebut, Pemerintah Provinsi melaksanakan kebijakan program prioritas pembangunan antara lain melalui Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program

Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, Program Pendidikan Menengah, Program Pendidikan Non Formal, Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Pendidikan Tinggi.

Capaian rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Jawa Timur, selama 2013-2015 terjadi peningkatan kualitas pendidikan penduduk yaitu dari 8,5 pada tahun 2013 menjadi 8,7 pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, namun demikian peningkatan ini perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas, baik sarana prasarana maupun mutu pendidikan di Jawa Timur.

Selanjutnya pada capaian Angka Partisipasi Murni (APM) secara umum dalam tiga tahun terakhir 2013-2015, terjadi peningkatan untuk semua jenjang pendidikan. Pada jenjang pendidikan SD, angka APM berkisar pada angka 97 hingga 98 persen. Sementara APM SLTP Jawa Timur 2013-2015 terus mengalami peningkatan mulai 86,36 persen pada tahun 2013 meningkat menjadi 87,64 persen ditahun 2015. Sementara APM SLTA, mulai tahun 2013 terus meningkat mulai dari 59,78 persen hingga pada tahun 2015 sebesar 65,83 persen.

Pada capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) secara umum dalam tiga tahun terakhir 2013-2015, terjadi peningkatan untuk semua jenjang pendidikan. Pada jenjang pendidikan SD, angka APK mulai tahun 2013 terus meningkat dari 112,70 persen hingga 112,79 persen pada tahun 2015. Sementara APK SLTP Jawa Timur 2013-2015 terus mengalami peningkatan mulai 102,22 persen pada tahun 2013 meningkat menjadi 102,90 persen ditahun 2015. Sementara APK SLTA, mulai tahun 2013 terus meningkat mulai dari 78,21 persen hingga pada tahun 2015 sebesar 79,14 persen.

*Kedua*, Bidang Kesehatan, dengan sasaran antara lain: Masyarakat yang mandiri dan hidup sehat, Meningkatkan Upaya Pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat, Meningkatkan Upaya Penanggulangan masalah gizi yang optimal, Meningkatkan Upaya Pengendalian penyakit dan masalah kesehatan akibat bencana, Meningkatkan akses pada lingkungan yang sehat, Meningkatkan sediaan farmasi, alkes, dan makanan bermutu, bermanfaat, dan aman, serta Terwujudnya sumber daya kesehatan yang memadai, proporsional, dan handal.

Upaya untuk mencapai sasaran bidang kesehatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melaksanakan melalui program

bidang kesehatan yaitu Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Upaya Kesehatan Perorangan, Program Perbaikan Gizi Masyarakat, Program Pengendalian Penyakit, Program Pengembangan Lingkungan Sehat, Program Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Pengamanan Makanan, serta Program Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan.

Capaian kinerja kesehatan diukur dari Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu, Persentase Balita Gizi Buruk serta Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapatkan perawatan. Capaian rata-rata Angka Harapan Hidup (AHH) di Jawa Timur selama tiga tahun terakhir (2013-2015) menunjukkan kecenderungan meningkat yaitu dari 70,34 pada tahun 2013 menjadi 70,61 pada tahun 2015; Angka Kematian Bayi selama tiga tahun terakhir menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2013 angkanya mencapai 27,23, selanjutnya terus menurun hingga tahun 2015 menjadi 25,82 Per 1000 kelahiran hidup, dengan demikian angka kelangsungan hidup bayi berbanding terbalik dengan angka kematian bayi, semakin rendah angka kematian bayi, maka semakin besar peluang kelangsungan hidup bayi; Angka Kematian Ibu selama tahun 2013-2015 terus menunjukan

penurunan, yaitu masing-masing 97,39 pada tahun 2013, kemudian 93,52 pada tahun 2014, dan 89,60 pada tahun 2015 per 100.000 kelahiran hidup; Jumlah balita status gizi buruk di Jawa Timur pada tahun 2013 sebesar 2,2 persen, kemudian menurun menjadi 2,0 persen pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 kembali meningkat menjadi 2,2 persen artinya diantara 100 balita 2 diantaranya mengalami gizi buruk; Perkembangan Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat Perawatan dalam tiga tahun terakhir tidak mengalami perubahan, yaitu 100 persen. Hal ini menggambarkan keseriusan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menurunkan gizi buruk.

*Ketiga*, Daya Beli Masyarakat, yaitu merupakan tingkat kemampuan seseorang, keluarga atau masyarakat untuk memperoleh suatu barang/jasa guna memenuhi kebutuhan hidup. Daya beli sangat berkaitan dengan kemampuan dalam memproduksi barang dan jasa, tingkat pendapatan yang diperoleh serta harga barang dan jasa di pasaran.

Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yaitu menjaga fluktuasi inflasi di Jawa Timur, dengan program subsidi ongkos angkut. Hal ini sebagai upaya untuk menstabilkan harga, selain itu kebijakan

Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga melarang masuknya barang impor ketika musim panen.

## **7. Indeks Pembangunan Gender**

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan memperhatikan ketimpangan gender dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.

Indeks pembangunan gender (IPG) dari waktu ke waktu memperlihatkan perkembangan yang semakin membaik. Hal ini dapat diindikasikan dengan adanya peningkatan IPG selama kurun waktu tahun 2013-2015, berturut-turut mencapai 90,22 (2013); 90,83 (2014), dan 91,29 (2015).

Peningkatan IPG setiap tahunnya menunjukkan bahwa program-program Pemerintah yang berpedoman pada pengarusutamaan gender, sudah memberikan hasil yang positif

terhadap peningkatan kapabilitas dasar perempuan Indonesia. Hal ini terlihat dari pencapaian IPG pada kurun waktu tersebut telah mampu mengurangi jarak (*gap*) secara nyata dalam pencapaian kemampuan dasar antara laki-laki dan perempuan. Namun demikian, masih perlu dilakukan upaya yang maksimal sehingga kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di seluruh kabupaten/kota bisa terwujud secara nyata.

## **8. Kualitas Air Sungai (BOD dan COD)**

Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan dan air tanah akibat aktivitas manusia. Danau, sungai, lautan dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Selain mengalirkan air juga mengalirkan sedimen dan polutan. Berbagai macam fungsinya sangat membantu kehidupan manusia. Pemanfaatan terbesar danau, sungai, lautan dan air tanah adalah untuk irigasi pertanian, bahan baku air minum, sebagai saluran pembuangan air hujan dan air limbah, bahkan sebenarnya berpotensi sebagai objek wisata. Sesuai perkembangan ekonomi dan pertumbuhan industri di DAS Brantas, pada saat ini potensi industri terdapat lebih kurang

1.004 buah dengan jumlah industri potensi pencemar lebih kurang 483 buah, di kali Surabaya 65 industri dan DAS Brantas 33 industri. Umumnya sumber pencemar berasal dari limbah domestik sebesar 50 persen, limbah industri sebesar 40 persen, limbah pertanian dan sebagainya sebesar 10 persen.

Dalam rangka meningkatkan kualitas air sungai Kali Brantas, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan arah kebijakan dengan sasaran Pengendalian sumber-sumber pencemar. Sasaran tersebut didukung oleh Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup melalui pemantauan kualitas air di kali Brantas, pengawasan industri dan usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan hukum lingkungan.

Selama periode 2014-2015, menunjukkan perbaikan dengan indikator penurunan konsentrasi *Biological Oxygen Demand* (BOD) dari 4,27 miligram per liter menjadi 4,14 miligram per liter dan *Chemical Oxygen Demand* (COD) dari 12,45 miligram per liter menjadi 11,88 miligram per liter. Dengan demikian pada tahun 2015 terdapat kenaikan kualitas air.



Apabila di dalam perairan banyak mengandung sampah organik, jumlah oksigen yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk memecah sampah tersebut akan besar, dan ini berarti angka BOD-nya tinggi. Angka BOD tinggi berarti angka *Dissolved Oxygen* (DO) rendah. Dengan banyak oksigen yang digunakan untuk memecah sampah maka kadar oksigen yang terlarut dalam air akan menurun, demikian pula untuk angka COD.

**RAPAT PARIPURNA YANG KAMI HORMATI**, berikutnya:

### **BAGIAN KEDUA**

#### **Penghargaan Pemerintah Atas Prestasi Yang Dicapai Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015.**

Selama kami menjalankan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2015 Pemerintah Provinsi telah memperoleh apresiasi berupa penghargaan dari Pemerintah baik dari Presiden maupun Kementrian/Lembaga.

Berbagai penghargaan yang diperoleh Provinsi Jawa Timur dalam Tahun 2015 berjumlah 20 (duapuluh) macam yang meliputi bidang Kesehatan, Pemerintahan, Reformasi Birokrasi, Lingkungan Hidup, Olah Raga, Industri, Ketenaga Kerjaan, Energi,

Kependudukan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan.

Apresiasi dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015 tersebut secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan intensitas keberhasilan kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam upaya melaksanakan urusan wajib dan pilihan.

Disamping itu apresiasi terhadap capaian kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga merupakan wujud penghargaan Pemerintah atas “rencana tindak” prioritas kebijakan dan program pembangunan Jawa Timur sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RKPD Tahun 2015 yang merupakan penjabaran tahapan tahun pertama dari dokumen RPJMD Tahun 2014-2019.

Kami sependapat bahwa penghargaan adalah bukti pengakuan publik terhadap keberhasilan kinerja yang dicapai secara berkualitas dan bermanfaat, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun masyarakat dalam upaya membangun “*image*” yang menunjukkan tingkat kompetensi terhadap suatu upaya untuk melakukan perubahan.

Namun kami menyadari betul bahwa penghargaan bukanlah merupakan tujuan utama bagi pemerintah provinsi Jawa Timur

dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di Jawa Timur, tetapi merupakan sarana pemicu semangat untuk bekerja lebih keras lagi sehingga dapat memberikan karya terbaik bagi masyarakat Jawa Timur pada umumnya dan Pemerintah Provinsi pada khususnya.

Kami mengucapkan syukur Alhamdulillah, dengan 20 (dua puluh) macam penghargaan tersebut, dapat diartikan bahwa pada tahun 2015 setiap bulan Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperoleh penghargaan. Penghargaan yang diterima Jawa Timur, secara lengkap sebagai berikut :

Pertama, 12 Pebruari 2015 Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan **“Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)”** yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri di Jakarta atas keberhasilan Jawa Timur dalam mewujudkan sistem PATEN yang baik sehingga mampu mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara baik dan cepat.

Kedua, 30 Maret 2015 Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan **“Anugrah Koni Award”** yang diserahkan oleh Sekretaris Kemenpora di Jakarta. Penghargaan ini diberikan karena Jawa Timur menjadi pelopor pengembangan olahraga terbaik. Selain itu Jawa Timur dinilai mampu sebagai

pemrakarsa dan inovator pengembangan infrastruktur dan prestasi olahraga di tingkat daerah, nasional maupun internasional sekaligus membangun iklim kondusif dengan seluruh *stakeholders* olahraga dalam pembinaan prestasi.

Ketiga, 27 April 2015 Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan **“Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Terbaik Tahun 2013”** yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri pada saat Peringatan Hari Otonomi Daerah ke XIX (sembilanbelas) di Jakarta. Penghargaan ini diberikan kepada pemerintah daerah yang memiliki kinerja terbaik secara nasional khususnya dalam penyelenggaraan urusan tata kelola pemerintahan.

Keempat, 28 April 2015 Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan **“Satya Lencana Karya Bhakti Praja Nugraha”** yang diserahkan oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta. Penghargaan ini diberikan karena Jawa Timur dinilai telah empat kali berturut-turut menerima penghargaan Samkaryanugraha Parasamya Purna Karya Nugraha sebagai juara pertama.

Kelima, 29 April 2015 Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan **“Pangripta Nusantara 2015 (Bidang**

**Perencanaan Pembangunan)**” yang diserahkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atas perencanaan pembangunan terbaik dan dinilai berhasil meningkatkan kualitas pembangunan. Penghargaan tersebut diberikan pada acara Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2015 di Jakarta.

Keenam, 29 April 2015 Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan **“Excellent Service Terbaik”** yang diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta. Dua layanan publik di Jawa Timur yang mendapatkan penghargaan tersebut adalah Ayo Kerja dan ATM Samsat.

Ketujuh, 27 Mei 2015 Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan **“Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Terbaik Kawasan Jawa Tahun 2015, Untuk Kategori Provinsi”** yang diserahkan oleh Presiden Republik Indonesia karena dinilai mampu menjaga inflasi di Jawa Timur. Langkah pengendalian inflasi daerah itu dapat dilihat dari sejumlah kegiatan andalan seperti program subsidi ongkos angkut bahan pokok.

Kedelapan, 10 Agustus 2015 Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan **“Pembina Industri Kecil dan**

**Menengah Berbasis Potensi Daerah”** yang diserahkan oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada saat Malam Apresiasi Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ke-20 di Jakarta. Penghargaan ini diberikan karena Jawa Timur dinilai mampu meningkatkan laju pembangunan iptek di daerah melalui penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa).

Kesembilan, 11 Agustus 2015 Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan **“Penggerak Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak 2015”** yang diserahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada saat Puncak Peringatan Hari Anak Nasional di Istana Kepresidenan Bogor, karena Provinsi Jawa Timur dianggap telah menjadi provinsi yang layak anak, baik kondisi fisik maupun non fisik dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.

Kesepuluh, 16 Agustus 2015 Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan **“Mabida Peduli Bidang Pramuka”** yang diserahkan oleh Presiden Republik Indonesia saat peringatan Hari Pramuka ke 54 tahun 2015. Penghargaan ini merupakan penghargaan yang diberikan oleh Kwartir Nasional Gerakan

Pramuka atas kontribusi nyata dari Majelis Pembimbing Daerah dalam memajukan gerakan Pramuka di Jawa Timur.

Kesebelas, 6 September 2015 Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan **“Dukungan Dalam Penyelenggaraan Rakernas Pencatatan Sipil 2015”** yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri pada acara Rapat Kerja Nasional Pencatatan Sipil Angkatan II tahun 2015 di Gedung Negara Grahadi.

Keduabelas, 17 Oktober 2015 Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan **“Pengelola Data Bencana dan PUSDALOPS, dan Websites BPBD Terbaik Tingkat Provinsi”** dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada acara Tangguh Award 2015 di Solo karena dinilai baik dalam kinerja dan kerjasamanya dalam menyampaikan laporan bencana di wilayah Jawa Timur.

Ketigabelas, 24 Nopember 2015 Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan **“Pembinaan Perusahaan Peraih Paramakarya”** yang diserahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan di Istana Negara Jakarta. Penghargaan ini merupakan prestasi atas dukungan dan pembinaan Pemprov Jatim kepada perusahaan

yang telah berhasil mendapatkan penghargaan produktivitas Paramakarya dalam upaya meningkatkan perekonomian Jatim.

Keempatbelas, 24 Nopember 2015 Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima **“Penghargaan Efisiensi Energi Nasional Peringkat II”** yang dilaksanakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta. Penghargaan ini merupakan prestasi atas keberhasilan Pemerintah dalam menerapkan efisiensi dan konservasi energi di lingkungannya.

Kelimabelas, 26 Nopember 2015 Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan **“Juara Umum Lomba Wana Lestari Tahun 2015”** yang diserahkan oleh Presiden Republik Indonesia. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi Kementrian Lingkungan Hidup atas kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang terus mendorong dan meningkatkan motivasi serta peran aktif masyarakat dalam pembangunan kehutanan.

Keenambelas, 27 Nopember 2015 Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan **“Swastisaba Wistara Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2015”** yang diserahkan oleh Menteri Kesehatan pada acara Hari Kesehatan Nasional ke-51 di Jakarta karena Jawa Timur dinilai berprestasi dan berkontribusi besar dalam pengembangan kabupaten/kota sehat.



Ketujuhbelas, 13 Desember 2015 Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan **“Dwidja Praja Nugraha”** yang diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Jakarta. Penghargaan ini diberikan karena dinilai memiliki dedikasi dalam mengembangkan dan memajukan pembangunan dunia pendidikan, serta memberikan perhatian kepada guru.

Kedelapanbelas, 15 Desember 2015 Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan **“Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi”** dengan predikat A (memuaskan), yang diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta. Penghargaan ini menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Kesembilanbelas, 20 Desember 2015 Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan **“Program Keluarga Harapan (PKH) 2015”** yang diserahkan oleh Menteri Sosial saat peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional ke-67 dan

Peringatan Hari Ibu ke-87 di Kupang NTT. Jawa Timur meraih penghargaan dengan Titel Konsistensi Terbaik Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2015.

Kedua puluh, 23 Desember 2015 Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan **“Wahana Tata Nugraha Wiratama Kencana”** yang diserahkan oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta. Penghargaan ini diberikan karena Jawa Timur untuk kali kelima berturut-turut meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN). Jawa Timur menjadi Provinsi Pertama di Indonesia yang menerima Penghargaan Wahana Tata Nugraha Wiratama Kencana.

## **PIMPINAN DAN SEGENAP ANGGOTA DEWAN YANG KAMI HORMATI**

Demikian, Nota Penjelasan terhadap LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2015 yang dapat kami sampaikan secara singkat kepada segenap Anggota Dewan Yang Terhormat. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, kritik dan saran selama pelaksanaan pembangunan di Jawa Timur tahun 2015. Selanjutnya mengenai laporan pertanggungjawaban kami selengkapnya dapat dicermati

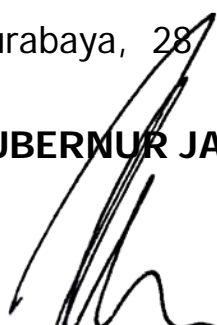
pada Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang telah disampaikan kepada segenap Anggota Dewan Yang Terhormat beberapa waktu sebelum sidang paripurna ini berlangsung.

Pada kesempatan terakhir, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Pimpinan Dewan dan Segenap Anggota Dewan Yang Terhormat, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, apabila dalam penyampaian Nota Penjelasan terhadap LKPJ Gubernur Tahun 2015, masih ditemui adanya kesalahan/kekeliruan baik mencakup substansi narasi maupun redaksional, sehingga menimbulkan makna yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya.

**Akhirul khalam,**  
*Wabillahii Taufik Wal Hidayah,*  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Surabaya, 28 Maret 2016

**GUBERNUR JAWA TIMUR**



**Dr. H. SOEKARWO**